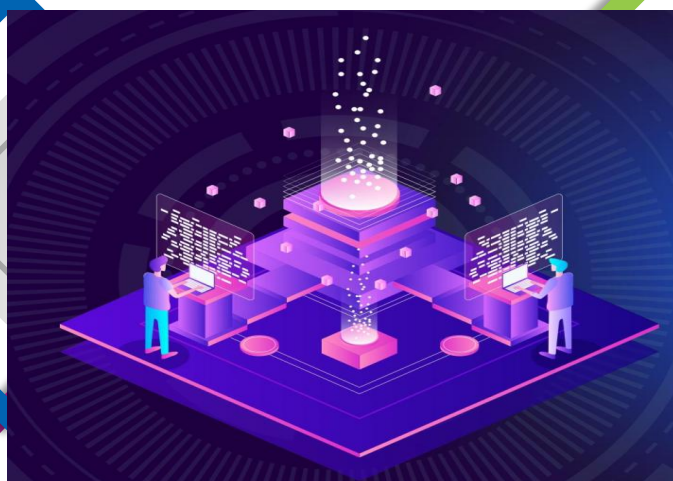




BAPENDA
SUMATERA SELATAN



KINERJA DAN FAKTA BAPENDA (KITAB)

TRIWULAN III TAHUN 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG**

TELP. 0711 – 310633 FAX 0711 – 319819 KODE POS 30137



A. LATAR BELAKANG

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan atau kegagalan dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam *strategic planning* Perangkat Daerah. Kinerja bisa diketahui hanya jika setiap jenjang level unit kerja tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan dan sasaran atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan dan sasaran atau target, kinerja setiap jenjang level tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang harus dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian proses sistematis dari beberapa aktivitas, alat, sumber daya serta prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan, pengklasifikasian, pengiktisaran, metodologi dan analisis, serta pelaporan pada tingkatan level instansi pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan dan kinerja serta peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari definisi operasional tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja bagi Bapenda mempunyai nilai manfaat untuk :

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pengguna layanan sehingga akan membawa Perangkat Daerah lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh jenjang level dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan (*Customer Perspective*).
- b. Motivasi dorongan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja sebagai bagian dari mata rantai penjejaran kinerja secara internal (*internal process perspective*).
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada (*stakeholder perspective*).
- d. Membuat suatu tujuan dan sasaran strategis menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran Perangkat Daerah (*Learning and Growth Perspective*).
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Untuk mendukung target dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merencanakan kinerja, mengukur kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja sesuai dengan *cascade down* yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Perencanaan kinerja seharusnya merupakan ukuran kinerja yang benar-benar ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Bapenda. Untuk itu, Bapenda telah merencanakan secara matang kondisi yang ingin dicapai dengan target-target yang cukup menantang namun memungkinkan untuk dicapai. Konsekuensinya, Bapenda akan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki dan kemampuan untuk merealisasikan apa yang direncanakannya sehingga prinsip dalam efisiensi dan efektivitas telah digunakan dengan semaksimalnya. Oleh karena itu, perencanaan dilengkapi dengan rencana mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Pelaksanaan dan pemantauan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memuat standart baku dalam pemantauan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (Laporan KITAB) yang dipantau serta dievaluasi secara berkala waktu (bulanan dan triwulanan).

Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (Laporan KITAB) merupakan laporan kinerja yang memuat dan menyajikan berbagai informasi :

1. Pencapaian kinerja;
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah;
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya dalam dokumen perencanaan jangka menengah;

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* kinerja) bersifat optional;
6. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
7. Efisiensi sumber daya yang digunakan dalam mencapai kinerja;
8. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dalam peningkatan kinerja;
9. Evaluasi hasil memberikan impact pada perbaikan kinerja.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

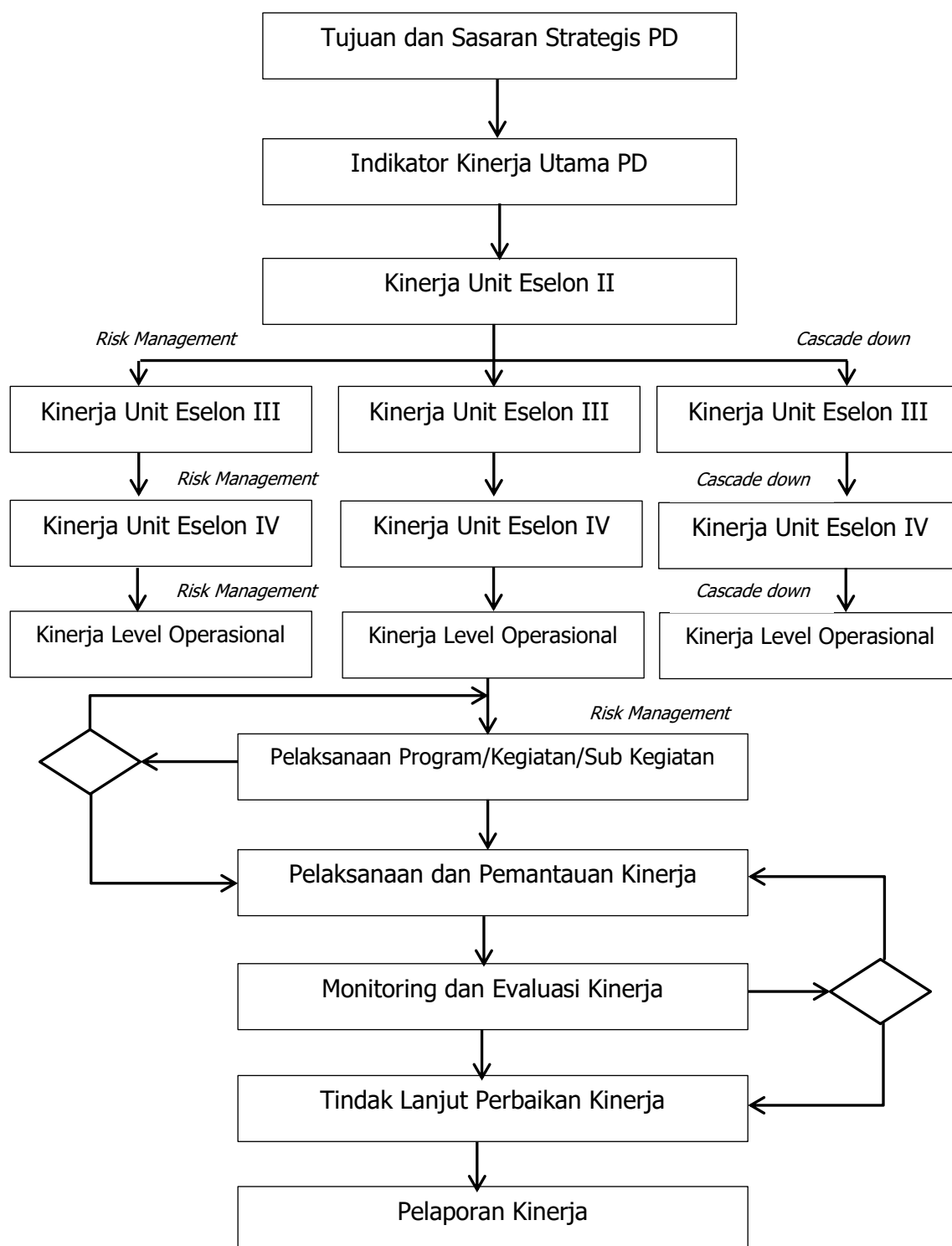
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tahapan terpenting dalam perencanaan kinerja yaitu berikutnya adalah mengukur keberhasilan/kegagalannya dalam merealisasikan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Bapenda melakukan pengukuran kinerja agar dapat memahami kinerjanya yang realistis, menantang dan dapat diukur, selanjutnya melakukan pemantauan dan pengendalian dalam upaya pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja. Dalam hal pengukuran kinerja dapat membedakan mana kelompok kinerja yang mempunyai kategori berhasil dan mana kelompok kinerja yang mempunyai kategori gagal. Dengan pemahaman ini, Bapenda dapat mempertahankan keberhasilan dan menghindari kegagalan yang sama pada periode-periode berikutnya. Pemahaman ini akan cenderung untuk memberikan *reward and punishment*. Dalam bentuk paling ringan kesalahan ini bisa berupa tidak memberikan *punishment* pada kelompok kinerja yang gagal atau tidak memberikan *reward* kepada yang berhasil, sedangkan dalam bentuk yang paling merugikan adalah berupa tidak memberikan *reward* pada yang gagal atau memberikan *punishment* kepada yang berhasil.

B. KERANGKA LOGIS

Kerangka logis dalam penyusunan Laporan KITAB ini dimulai dengan perumusan tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, mengidentifikasi dan menetapkan Kinerja Unit Eselon II, mengidentifikasi dan menganalisa penjenjangan kinerja (*cascade down*) Unit Kerja Eselon III sampai dengan level operasional staff, mengidentifikasi dan menganalisa Risiko Strategis (RSO) dan Risiko Operasional (ROO) Perangkat Daerah, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, pelaksanaan dan pemantauan pengukuran kinerja, Monitoring dan evaluasi atas

pencapaian kinerja, tindak lanjut pelaksanaan kinerja serta pelaporan kinerja, secara diagram kerangka logis tergambar sebagai berikut :



C. TUJUAN KITAB

Secara umum tujuan dibuatnya Laporan KITAB ini adalah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja serta mendorong peningkatan capaian kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil (*outcomes*) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara tujuan khusus yang ingin dicapai melalui Laporan KITAB ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa capaian kinerja setiap jenjang level telah berhasil atau tidak;
2. Menilai tingkat kinerja akuntabilitas setiap level;
3. Memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kinerja unit kerja;
4. Sebagai dokumen kendali atas rekomendasi hasil evaluasi pada periode sebelumnya dan memberikan gambaran apa yang akan dicapai dalam jangka menengah.

D. RUANG LINGKUP KITAB

Monitoring dan evaluasi melalui Laporan KITAB ini menjadi basis data kinerja unit kerja yang meliputi aktivitas monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan kinerja jangka menengah maupun jangka pendek termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi atas hasil pencapaian kinerja.

Dalam pelaporannya, KITAB mencakup ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kualitas atas perencanaan kinerja yang selaras dan *cascade down* terhadap tujuan dan sasaran strategis yang *sustainable*;
2. Pengukuran kinerja secara berjenjang pada setiap level dan berkelanjutan menjadikan kebutuhan dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis unit kerja;

3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja serta upaya/perbaikan yang dilakukan memberikan umpan balik untuk menentukan strategi/kebijakan yang tepat mencapai kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendorong timbulnya impact positif dalam peningkatan kinerja untuk efektivitas dan efisiensi kinerja berkelanjutan;
5. Capaian kinerja pada level output (sub kegiatan) dan level outcomes (program/tujuan/sasaran) serta memberikan impact positif untuk kinerja.

E. MANFAAT

Adapun nilai manfaat dari adanya evaluasi dan pemantauan Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) adalah:

- Mengidentifikasi atau mengetahui terpenuhinya keinginan dan ekspektasi layanan kepada masyarakat atau pelanggan serta memastikan bahwa layanan Bapenda *delivered*;
- Membantu Bapenda memahami lebih dalam proses atau apa yang (selama ini) dilakukannya dan tujuan yang ingin dicapai;
- Memastikan bahwa keputusan yang diambil (telah) berdasarkan fakta atau data kinerja;
- Mengetahui dimana (pada tahap apa) perbaikan perlu dilakukan dan bagaimana memperbaikinya;
- Mengetahui apakah perbaikan benar-benar telah dilakukan (terjadi)
- Mengungkapkan permasalahan yang selama ini (mungkin) belum diketahui;
- Memastikan pemahaman para pelaksana akun ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja;
- Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja;

- Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
- Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
- Mengidentifikasi apakah kepuasan sudah terpenuhi;
- Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
- Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif;
- Menunjukkan peningkatan perlu dilakukan;
- Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Jika selama ini Bapenda bekerja tanpa evaluasi dan pemantauan kinerja, kita mungkin berasumsi bahwa segala sesuatunya dalam keadaan baik. (Hal tersebut mungkin benar mungkin pula tidak, tetapi tanpa evaluasi dan pemantauan kinerja tidak alasan untuk menyatakan tidak ada masalah). Sehingga bisa menimbulkan penerapan pengendalian intern serta manajemen risiko dalam upaya pencapaian kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.



A. Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Bapenda dalam dokumen KITAB ini meliputi beberapa aspek-aspek pengukuran pencapaian antara lain :

- a) Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b) Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c) Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
- d) Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- e) Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f) Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Selama periode Triwulan III (Juli, Agustus dan September) tahun 2025, kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	3,24 %	2,091 %	64,53 %	3,33 %	2,15 %	64,56 %	3,82 %	2,83 %	74,08 %	5,00 %
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,165	0,118	71,51 %	0,187	0,123	65,77 %	0,211	0,146	69,19 %	0,434 Indeks
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,531 %	0,421 %	79,28 %	0,624 %	0,471 %	75,48 %	0,726 %	0,512 %	70,52 %	1,26 %
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,436 %	0,387 %	88,76 %	0,504 %	0,424 %	84,12 %	0,542 %	0,471 %	86,90 %	0,95 %
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,04 %	21,03 %	80,76 %	27,88 %	23,14 %	82,99 %	32,16 %	25,86 %	80,41 %	48,45 %

	Daerah											
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	64,08 %	51,46 %	80,30 %	70,08 %	56,36 %	80,42 %	75,00 %	59,49 %	79,32 %	92,03 %
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,508 %	0,173 %	34,05 %	0,541 %	0,189 %	34,93 %	0,546	0,217	39,74 %	0,96 %
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,512	0,228	44,53 %	0,545	0,243	44,58 %	0,572	0,287	50,17 %	1,12 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pajak Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,78 %	0,665 %	85,25 %	0,85 %	0,792 %	93,17 %	0,88 %	0,802 %	91,13 %	1,61 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	7,36 %	7,11 %	96,60 %	8,45 %	8,09 %	95,73 %	9,55 %	9,13 %	95,60 %	14,53 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	3,91	3,23 %	82,60 %	4,16 %	3,95 %	94,95 %	4,41 %	4,12 %	93,42 %	5,19 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	63,17 %	61,21 %	96,89 %	71,44 %	68,82 %	96,33 %	76,71 %	71,44 %	93,12 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	62,96 %	57,86 %	91,89 %	70,11 %	64,52 %	92,02 %	75,26 %	71,71 %	95,28 %	95,12 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	58,74 %	52,36 %	89,13 %	65,86 %	60,46 %	91,80 %	68,98 %	64,54 %	93,56 %	89,45 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	57,12 %	54,61 %	95,60 %	64,04 %	60,33 %	94,20 %	70,18 %	67,25 %	95,82 %	83,71 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	45,17 %	41,28 %	91,38 %	52,58 %	48,56 %	92,35 %	58,86 %	53,36 %	90,65 %	84,42 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100 %	3	3	100 %	3	3	100 %	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	62,84 %	57,89 %	92,12 %	68,93 %	62,13 %	90,13 %	75,02 %	70,07 %	93,40 %	92,64 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	11,18 %	10,56 %	94,45 %	13,41 %	11,26 %	83,96 %	14,19 %	12,32 %	86,82 %	17,03 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	8,19 %	7,85 %	95,84 %	8,42 %	8,02 %	95,24 %	9,23 %	8,87 %	96,09 %	12,88 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2025	TARGET TAHUNAN 2025
-----	-------------------	-------------------	---	---------------------

			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	45,16 %	41,25 %	91,34 %	55,28 %	51,21 %	92,63 %	62,73 %	57,74 %	92,04 %	81,89 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	47,18 %	44,66 %	94,65 %	53,38 %	49,62 %	92,95 %	69,58 %	66,36 %	95,37 %	83,69 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	53,79 %	50,23 %	93,38 %	69,61 %	63,52 %	91,25 %	76,82 %	72,26 %	94,06 %	93,41 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	53,84 %	49,78 %	92,45 %	60,05 %	54,61 %	90,94 %	72,66 %	69,13 %	95,14 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Sekretariat Tahun 2025			TARGET AKHIR TAHUN 2025
			Juli	Agustus	September	

1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	54,91 %	50,36 %	91,71 %	63,28 %	60,36 %	95,38 %	74,69 %	71,40 %	95,59 %	94,83 %
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	4,53 %	4,53 %	100 %	4,53 %	4,53 %	100 %	4,53 %	4,53 %	100 %	5,02 %
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	44,73 %	41,41 %	92,57 %	60,85 %	57,03 %	93,72 %	66,97 %	61,26 %	91,47 %	80,78 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya	Persentase	39,31 %	34,52 %	87,81 %	43,46 %	41,28 %	94,98 %	47,15 %	44,28 %	93,91 %	62,34 %

	Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi										
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	49,31 %	45,63 %	92,53 %	58,53 %	53,69 %	91,73 %	67,76 %	62,62 %	92,41 %	100 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	36,52 %	31,29 %	85,67 %	40,66 %	36,61 %	90,03 %	49,18 %	46,58 %	94,71 %	78,93 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	32,39 %	30,30 %	93,54 %	33,47 %	31,26 %	93,39 %	34,51 %	32,32 %	93,65 %	41,46
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 Mbps	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	

1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	50,62 %	47,41 %	93,65 %	66,10 %	63,32 %	95,79 %	73,14 %	69,71 %	95,31 %	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	6,48 %	6,17 %	95,21 %	7,35 %	7,02 %	95,51 %	8,22 %	7,82 %	95,13 %	8,87 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	4,92 %	4,12 %	83,73 %	5,18 %	4,85 %	93,62 %	5,62 %	5,13 %	91,28 %	9,72 %

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Tahun 2025			TARGET TAHUNAN 2025
			Juli	Agustus	September	

			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	3,24 %	2,091 %	41,82 %	3,33 %	2,15 %	43,00 %	3,82 %	2,83 %	56,60 %	5,00 %
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,165	0,118	27,18 %	0,187	0,123	28,34 %	0,211	0,146	33,64 %	0,434 Indeks
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,531 %	0,421 %	33,41 %	0,624 %	0,471 %	37,38 %	0,726 %	0,512 %	40,63 %	1,26 %
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,436 %	0,387 %	40,73 %	0,504 %	0,424 %	44,63 %	0,542 %	0,471 %	49,57 %	0,95 %
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,04 %	21,03 %	43,40 %	27,88 %	23,14 %	47,76 %	32,16 %	25,86 %	53,37 %	48,45 %
6.	Meningkatnya Pendapatan	Persentase Realisasi	64,08 %	51,46 %	55,91 %	70,08 %	56,36 %	61,24 %	75,00 %	59,49 %	64,64 %	92,03 %

	Daerah	Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)										
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,508 %	0,173 %	18,02 %	0,541 %	0,189 %	19,68 %	0,546	0,217	22,60 %	0,96 %
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,512	0,228	20,35 %	0,545	0,243	21,69 %	0,572	0,287	25,62 %	1,12 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pajak Tahun 2025			TARGET TAHUNAN 2025
			Juli	Agustus	September	

			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,78 %	0,665 %	41,30 %	0,85 %	0,792 %	49,19 %	0,88 %	0,802 %	49,81 %	1,61 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	7,36 %	7,11 %	48,93 %	8,45 %	8,09 %	55,67 %	9,55 %	9,13 %	62,83 %	14,53 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	3,91	3,23 %	62,23 %	4,16 %	3,95 %	76,10 %	4,41 %	4,12 %	79,38 %	5,19 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	63,17 %	61,21 %	61,21 %	71,44 %	68,82 %	68,82 %	76,71 %	71,44 %	71,44 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2025	TARGET TAHUNAN 2025
-----	-------------------	-------------------	---	---------------------

			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	62,96 %	57,86 %	60,82 %	70,11 %	64,52 %	67,83 %	75,26 %	71,71 %	75,38 %	95,12 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	58,74 %	52,36 %	58,53 %	65,86 %	60,46 %	67,59 %	68,98 %	64,54 %	72,15 %	89,45 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	57,12 %	54,61 %	65,23 %	64,04 %	60,33 %	72,07 %	70,18 %	67,25 %	80,33 %	83,71 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	45,17 %	41,28 %	48,89 %	52,58 %	48,56 %	57,52 %	58,86 %	53,36 %	63,20 %	84,42 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025	TARGET TAHUNAN
-----	-------------------	-------------------	--	----------------

			Juli			Agustus			September			2025
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100 %	3	3	100 %	3	3	100 %	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	62,84 %	57,89 %	62,48 %	68,93 %	62,13 %	67,06 %	75,02 %	70,07 %	75,63 %	92,64 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	11,18 %	10,56 %	62,00 %	13,41 %	11,26 %	66,11 %	14,19 %	12,32 %	72,34 %	17,03 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	8,19 %	7,85 %	60,94 %	8,42 %	8,02 %	62,26 %	9,23 %	8,87 %	68,86 %	12,88 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2025			TARGET TAHUNAN 2025
			Juli	Agustus	September	

			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	45,16 %	41,25 %	50,37 %	55,28 %	51,21 %	62,53 %	62,73 %	57,74 %	70,50 %	81,89 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	47,18 %	44,66 %	53,36 %	53,38 %	49,62 %	59,29 %	69,58 %	66,36 %	79,29 %	83,69 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	53,79 %	50,23 %	53,77 %	69,61 %	63,52 %	68,00 %	76,82 %	72,26 %	77,35 %	93,41 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	53,84 %	49,78 %	49,78 %	60,05 %	54,61 %	54,61 %	72,66 %	69,13 %	69,13 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Sekretariat Tahun 2025			TARGET AKHIR TAHUN 2025
			Juli	Agustus	September	

			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	54,91 %	50,36 %	53,10 %	63,28 %	60,36 %	63,65 %	74,69 %	71,40 %	75,29 %	94,83 %
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	4,53 %	4,53 %	90,23 %	4,53 %	4,53 %	90,23 %	4,53 %	4,53 %	90,23 %	5,02 %
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	44,73 %	41,41 %	51,26 %	60,85 %	57,03 %	70,59 %	66,97 %	61,26 %	75,83 %	80,78 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap	Target	Realisasi	Capaian Terhadap	Target	Realisasi	Capaian Terhadap	

					Tahunan			Tahunan			Tahunan	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	39,31 %	34,52 %	55,37 %	43,46 %	41,28 %	66,21 %	47,15 %	44,28 %	71,02 %	62,34 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	49,31 %	45,63 %	45,63 %	58,53 %	53,69 %	53,69 %	67,76 %	62,62 %	62,62 %	100 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	36,52 %	31,29 %	39,64 %	40,66 %	36,61 %	46,38 %	49,18 %	46,58 %	59,01 %	78,93 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	32,39 %	30,30 %	73,08 %	33,47 %	31,26 %	75,39 %	34,51 %	32,32 %	77,95 %	41,46
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 Mbps	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025			TARGET TAHUNAN 2025
			Juli	Agustus	September	

			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	50,62 %	47,41 %	47,41 %	66,10 %	63,32 %	63,32 %	73,14 %	69,71 %	69,71 %	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	6,48 %	6,17 %	69,56 %	7,35 %	7,02 %	79,14 %	8,22 %	7,82 %	88,16 %	8,87 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	4,92 %	4,12 %	42,38 %	5,18 %	4,85 %	49,89 %	5,62 %	5,13 %	52,77 %	9,72 %

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Yang Tertuang Dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Tahun 2025	TARGET JANGKA
-----	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------

			Juli			Agustus			September			MENENGAH
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	3,24 %	2,091 %	41,82 %	3,33 %	2,15 %	43,00 %	3,82 %	2,83 %	56,60 %	8,51 %
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,165	0,118	27,18 %	0,187	0,123	28,34 %	0,211	0,146	33,64 %	0,520 Indeks
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,531 %	0,421 %	33,41 %	0,624 %	0,471 %	37,38 %	0,726 %	0,512 %	40,63 %	1,48 %
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,436 %	0,387 %	40,73 %	0,504 %	0,424 %	44,63 %	0,542 %	0,471 %	49,57 %	1,27 %
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,04 %	21,03 %	43,40 %	27,88 %	23,14 %	47,76 %	32,16 %	25,86 %	53,37 %	55,64 %

	Daerah											
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pajak Tahun 2025									TARGET JANGKA MENENGAH
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap	Target	Realisasi	Capaian Terhadap	Target	Realisasi	Capaian Terhadap	

					Jangka Menengah			Jangka Menengah			Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,78 %	0,665 %	33,92 %	0,85 %	0,792 %	40,40 %	0,88 %	0,802 %	40,91 %	1,96 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	7,36 %	7,11 %	46,53 %	8,45 %	8,09 %	52,94 %	9,55 %	9,13 %	59,75 %	15,28 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	3,91	3,23 %	53,83 %	4,16 %	3,95 %	65,83 %	4,41 %	4,12 %	68,66 %	4,62 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	63,17 %	61,21 %	61,21 %	71,44 %	68,82 %	68,82 %	76,71 %	71,44 %	71,44 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2025									TARGET JANGKA MENENGAH
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	62,96 %	57,86 %	60,27 %	70,11 %	64,52 %	67,20 %	75,26 %	71,71 %	74,69 %	96,00 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	58,74 %	52,36 %	58,12 %	65,86 %	60,46 %	67,11 %	68,98 %	64,54 %	71,64 %	90,08 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	57,12 %	54,61 %	64,71 %	64,04 %	60,33 %	66,97 %	70,18 %	67,25 %	79,68 %	84,39 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	45,17 %	41,28 %	48,41 %	52,58 %	48,56 %	56,94 %	58,86 %	53,36 %	62,57 %	85,27 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025									TARGET JANGKA MENENGAH
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100 %	3	3	100 %	3	3	100 %	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	62,84 %	57,89 %	61,84 %	68,93 %	62,13 %	66,37 %	75,02 %	70,07 %	74,85 %	93,61 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	11,18 %	10,56 %	65,22 %	13,41 %	11,26 %	69,54 %	14,19 %	12,32 %	76,09 %	16,19 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	8,19 %	7,85 %	63,87 %	8,42 %	8,02 %	65,25 %	9,23 %	8,87 %	72,17 %	12,29 %

	Pendapatan Daerah											
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET JANGKA MENENGAH
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	45,16 %	41,25 %	49,76 %	55,28 %	51,21 %	61,78 %	62,73 %	57,74 %	69,65 %	82,89 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	47,18 %	44,66 %	52,96 %	53,38 %	49,62 %	58,84 %	69,58 %	66,36 %	78,70 %	84,32 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	53,79 %	50,23 %	53,35 %	69,61 %	63,52 %	67,46 %	76,82 %	72,26 %	76,74 %	94,15 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	53,84 %	49,78 %	49,78 %	60,05 %	54,61 %	54,61 %	72,66 %	69,13 %	69,13 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Sekretariat Tahun 2025									TARGET JANGKA MENENGAH
			Juli			Agustus			September			
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
		Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	54,91 %	50,36 %	52,77 %	63,28 %	60,36 %	63,25 %	74,69 %	71,40 %	74,81 %	95,43 %
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	4,53 %	4,53 %	105,84 %	4,53 %	4,53 %	105,84 %	4,53 %	4,53 %	105,84 %	4,28 %
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	44,73 %	41,41 %	50,54 %	60,85 %	57,03 %	69,61 %	66,97 %	61,26 %	74,78 %	81,92 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi Tahun 2025									TARGET JANGKA MENENGAH
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	39,31 %	34,52 %	54,74 %	43,46 %	41,28 %	65,46 %	47,15 %	44,28 %	70,21 %	63,06 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	49,31 %	45,63 %	49,52 %	58,53 %	53,69 %	58,27 %	67,76 %	62,62 %	67,96 %	92,14 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	36,52 %	31,29 %	39,20 %	40,66 %	36,61 %	45,87 %	49,18 %	46,58 %	58,36 %	79,81 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	32,39 %	30,30 %	71,32 %	33,47 %	31,26 %	73,58 %	34,51 %	32,32 %	76,08 %	42,48
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 Mbps	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET JANGKA MENENGAH
			Juli			Agustus			September			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	50,62 %	47,41 %	47,41 %	66,10 %	63,32 %	63,32 %	73,14 %	69,71 %	69,71 %	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	6,48 %	6,17 %	75,98 %	7,35 %	7,02 %	86,45 %	8,22 %	7,82 %	96,30 %	8,12 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	4,92 %	4,12 %	44,73 %	5,18 %	4,85 %	52,66 %	5,62 %	5,13 %	55,70 %	9,21 %

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	1,668 %	2,091 %	125,35 %	1,817 %	2,15 %	118,32 %	1,912 %	2,83 %	148,01 %	5,00 %
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	NA	0,118	NA	NA	0,123	NA	NA	0,146	NA	0,434 Indeks
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	NA	0,421 %	NA	NA	0,471 %	NA	NA	0,512 %	NA	1,26 %
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap	NA	0,387 %	NA	NA	0,424 %	NA	NA	0,471 %	NA	0,95 %

	terhadap PDRB	PDRB										
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	NA	21,03 %	NA	NA	23,14 %	NA	NA	25,86 %	NA	48,45 %
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43,620 %	51,46 %	117,97	52,880 %	56,36 %	106,58 %	75,030 %	59,49 %	79,28 %	92,03
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,294 %	0,173 %	58,84 %	0,423 %	0,189 %	44,68 %	0,599 %	0,217 %	36,22 %	0,96
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,502 %	0,228 %	45,41 %	0,621 %	0,243 %	39,13 %	0,698 %	0,287 %	41,11 %	1,12

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pajak Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,871 %	0,665 %	76,34 %	0,926 %	0,792 %	85,52 %	1,00 %	0,802 %	80,2 %	1,61 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	7,016 %	7,11 %	101,33 %	7,911 %	8,09 %	102,26 %	8,547 %	9,13 %	106,82 %	14,53 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	3,251	3,23 %	99,35 %	3,421 %	3,95 %	115,46 %	3,921 %	4,12 %	105,07 %	5,19 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	54,727 %	61,21 %	111,84 %	61,610 %	68,82 %	111,70 %	69,325 %	71,44 %	103,05 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	54,721 %	57,86 %	105,73 %	60,921 %	64,52 %	105,90 %	72,135 %	71,71 %	99,41 %	95,12 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	53,611 %	52,36 %	97,66 %	61,774 %	60,46 %	97,87 %	64,552 %	64,54 %	99,98 %	89,45 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	28,662 %	54,61 %	190,53 %	38,774 %	60,33 %	155,59 %	58,396 %	67,25 %	115,16 %	83,71 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	22,361 %	41,28 %	184,60 %	34,599 %	48,56 %	140,35 %	43,655 %	53,36 %	122,23 %	84,42 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100 %	3	3	100 %	3	3	100 %	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	53,601 %	57,89 %	108,00 %	60,301 %	62,13 %	103,03 %	70,164 %	70,07 %	99,86 %	92,64 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	8,147 %	10,56 %	129,61 %	8,603 %	11,26 %	130,88 %	9,663 %	12,32 %	127,49 %	17,03 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	5,824 %	7,85 %	134,78 %	7,326 %	8,02 %	109,47 %	8,102 %	8,87 %	109,47 %	12,88 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Penggalian Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	42,633 %	41,25 %	96,75 %	48,756 %	51,21 %	105,03 %	54,336 %	57,74 %	106,26 %	81,89 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	42,562 %	44,66 %	104,92 %	53,669 %	49,62 %	92,45 %	59,632 %	66,36 %	111,28 %	83,69 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	50,264 %	50,23 %	99,93 %	64,536 %	63,52 %	98,42 %	72,562 %	72,26 %	99,58 %	93,41 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	52,154 %	49,78 %	95,44 %	60,609 %	54,61 %	90,10 %	70,712 %	69,13 %	97,76 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Sekretariat Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah											
		Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	58,544 %	50,36 %	86,02 %	68,577 %	60,36 %	88,01 %	74,69 %	71,40 %	74,81 %	94,83 %
		Persentase Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	5,13 %	4,53 %	88,30 %	5,13 %	4,53 %	88,30 %	5,13 %	4,53 %	88,30 %	5,02 %
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	40,403 %	41,41 %	102,49 %	48,701 %	57,03 %	117,10 %	59,301 %	61,26 %	103,30 %	80,78 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	36,601 %	34,52 %	94,31 %	36,601 %	41,28 %	112,78 %	43,316 %	44,28 %	102,22 %	62,34 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	40,402 %	45,63 %	112,93 %	48,201 %	53,69 %	111,38 %	53,633 %	62,62 %	116,75 %	100 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	30,306 %	31,29 %	103,24 %	40,66 %	36,61 %	45,87 %	48,023 %	46,58 %	96,95 %	78,93 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	29,601 %	30,30 %	102,36 %	31,314 %	31,26 %	99,82 %	32,162 %	32,32 %	100,49 %	41,46
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 Mbps	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET TAHUNAN 2025
			Juli			Agustus			September			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	48,515 %	47,41 %	97,72 %	58,677 %	63,32 %	107,91 %	68,682 %	69,71 %	101,49 %	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	4,633 %	6,17 %	133,17 %	6,024 %	7,02 %	116,53 %	6,912 %	7,82 %	113,13 %	8,87 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	4,811 %	4,12 %	85,63 %	5,911 %	4,85 %	82,05 %	6,851 %	5,13 %	74,87 %	9,72 %

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja) Bersifat Optional

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah merupakan fungsi penunjang pemerintahan daerah urusan keuangan sub urusan pendapatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pendapatan daerah, telah mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa untuk indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah tidak mengacu pada indikator di level nasional maupun internasional, oleh karena jenis pajak dan jenis retribusi yang dikelola berbeda. Sehingga realisasi kinerja tidak bisa dibanding antara daerah dan pusat.

F. Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Mematuhi kaidah dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Atas pelaksanaan pemantauan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 014/KPTS/BAPENDA/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Kegiatan serta Sub Kegiatan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Program kegiatan serta sub kegiatan merupakan alat/proses untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, dimana dilakukan pemantauan atas pelaksanaannya secara berkala waktu Triwulan III (Juli – Agustus – September) tahun 2025.



BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KINERJA

A. Kualitas Atas Capaian Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya

Atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu Triwulan III (Juli – Agustus – September) tahun 2025 terus menunjukkan trend kenaikan yang positif karena berbagai terobosan atau upaya yang dilakukan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah:

- 1) Memberikan program keringanan tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif;
- 2) Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal;
- 4) Penempelan stiker tanda lunas di kendaran bermotor sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak dengan melakukan;
- 5) Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan;
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap;

- 7) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru;
- 8) Terus membangun sinergitas dengan mitra kerja:
 - ✓ Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor;
 - ✓ Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan;
 - ✓ Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah;
 - ✓ Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;
 - ✓ Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data;
 - ✓ Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses datakependudukan.
- 9) Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin;
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
- 11) Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- 12) Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya;
- 13) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan

retribusi daerah;

- 14) Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah;
- 15) Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru;
- 16) Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsatbapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern;
- 17) Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel;
- 18) Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan;
- 19) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), antara lain:
 - Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
 - Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif;
 - Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan

penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);

- Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan.

b. Retribusi Daerah:

- 1) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;
- 2) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

c. Bagian Penerimaan Hasil Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.

d. Bagian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
- 2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam menggali pendapatan asli daerah.

e. Pendapatan Transfer

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan Pendapatan Transfer, baik komponen penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 2) Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 3) Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.

f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Efisiensi Sumber Daya Yang Digunakan Dalam Mencapai Kinerja

1. Analisis Sumber Daya Manusia

- a). Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk pegawai UPTB Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan per Desember 2025 berjumlah 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang pegawai, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) orang

Golongan IV, 504 (lima ratus empat) orang Golongan III dan 20 (dua puluh) orang Golongan II;

- b). Ditinjau dari jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah cukup memadai dan telah mampu mengakomodir kebutuhan badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi dari segi kualitas SDM masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya jumlah pegawai Bapenda yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional yang ada;
- c). Untuk menunjang kinerja Badan Pendapatan Daerah, terlampir disajikan kondisi eksisting serta kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir.

2. Analisa Sumber Daya Aset

- a) Sejumlah aset yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada wajib pajak berupa kepemilikan gedung kantor cukup memadai. Dari 29 UPTB kabupaten/kota masih terdapat 16 UPTB yang belum mempunyai gedung kantor, sehingga harus menyewa gedung untuk operasionalnya begitu juga untuk mess pegawai masing-masing UPTB;
- b) Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan di kabupaten/kota maka telah dibentuk 8 UPTB baru yang resmi beroperasi pada tahun 2020 sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor. Badan Pendapatan Daerah telah mengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan fasilitas diisi pada seluruh UPTB dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalokasikan pembangunan 2 unit kantor UPTB pada APBD Tahun Anggaran 2025 dan akan dianggarkan seterusnya secara bertahap untuk kedepannya;

- c) Sampai dengan saat ini Badan Pendapatan Daerah telah memiliki lebih dari 60 titik layanan pajak yang berupa: UPTB, Samsat Keliling, Samsat Corner, Drive thru, yang tersebar di 17 Kab/Kota;
- d) Mobile Samsat, Badan pendapatan daerah memiliki unit pelayanan Samsat Keliling pembayaran pajak melalui samsat keliling sejak tahun 2017 yang lalu. Pada saat ini mobil operasional yang digunakan dalam memberikan pelayanan melalui samsat keliling telah dimiliki sejumlah 21 unit dan akan ditambah dalam upaya memberikan pelayanan prima secara professional kepada wajib pajak;
- e) Samsat Drive Thru, pelayanan pembayaran pajak secara cepat dan praktis tanpa melalui antrian yang panjang juga telah disediakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan saat ini sudah beroperasi 3 (tiga) samsat Drive Thru dan kedepan akan diperluas secara bertahap;
- f) Samsat Mall, merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang terdapat di dalam pusat perbelanjaan besar di Kota Palembang, yaitu: PTC Mall, PIM, PS Mall dan di Lubuklinggau;
- g) Samsat Corner, salah satu bentuk titik pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan pihak kepolisian yang berada di UPTB Kab/Kota tepatnya diwilayah kecamatan;
- h) Dukungan sarana IT berupa aplikasi samsat/jaringan server induk dalam melakukan perhitungan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang masuk disetiap UPTB/Samsat Kab/Kota. Kondisi sekarang masih belum sempurna dan perlu dilakukan penambahan aplikasi pendukung yang baru seperti kemampuan aplikasi untuk mengkalkulasi jumlah tunggakan pajak dan lain sebagainya.

3. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Terkait informasi keuangan, berikut disajikan efisiensi anggaran yang kurang mendukung target dan capaian kinerja berdasarkan *cascading* pohon kinerja sebagai berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU [Rp.]		EFISIENSI [Rp.]
		Sebelum	Setelah	
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	637.400.000	397.825.000	239.575.000
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.150.000.000	324.000.000	826.000.000
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.000.000.000	1.188.000.000	812.000.000
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.255.000.000	1.010.000.000	245.000.000
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.625.000.000	737.500.000	887.500.000
6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	734.392.000	422.507.400	311.884.600
7.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	175.000.000	92.900.000	82.100.000
8.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.074.821.800	496.581.260	578.240.540
9.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.000.000	50.300.000	49.700.000
10.	Penagihan Pajak Daerah	589.450.500	312.615.350	276.835.150
11.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000	27.000.000	23.000.000
12.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	375.000.000	231.280.000	143.720.000
13.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	50.000.000	25.400.000	24.600.000
14.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	140.000.000	83.000.000	57.000.000
	JUMLAH EFISIENSI			4.557.155.290

C. Hambatan

Hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

1.a Tata kelola organisasi belum optimal;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya dua peraturan ini semestinya pengelolaan organisasi terutama terkait pemerataan pegawai/sumber daya manusia pada seluruh unit kerja/UPTB bisa dioptimalkan, namun kondisi pada saat ini belum bisa optimal dikarenakan belum meratanya distribusi pegawai/SDM pada seluruh unit kerja/UPTB Bapenda.

1.b Belum optimalnya upaya intensifikasi pendapatan daerah diluar pajak

Apabila dilihat dari pencapaian penerimaan pendapatan daerah pada komponen PAD tahun 2020, kontribusi terbesar adalah sektor pajak dengan rata-rata kontribusi 91,31% sedangkan non pajak hanya berkontribusi 8,69 %. Dari komposisi pembentuk PAD ini dapat diketahui bahwa PAD Prov.Sumsel sangat bergantung pada sektor pajak, sementara kontribusi dari retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (pengelolaan BUMD) masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengelolaan pendapatan sektor non pajak terutama sektor retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), sehingga dibutuhkan upaya, inovasi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber PAD dari retribusi dan pengelolaan BUMD.

1.c Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan teknologi selayaknya dapat kita manfaatkan untuk mempermudah seluruh aktivitas, begitu juga dengan pengelolaan

pendapatan daerah. Kebutuhan akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT. Untuk pengelolaan Non SAMSAT dilakukan bersama institusi Sat POL PP, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan BUMD. Pembangunan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendapatan daerah mutlak harus dilakukan untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan institusi mitra pengelolaan pendapatan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pendapatan daerah. Dengan adanya aplikasi/sistem yang mumpuni dengan segala kemudahannya maka akan terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien yang pada ujungnya akan mampu mendorong pencapaian pendapatan daerah. Saat ini Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan masih tentang pada pengelolaan Samsat, Untuk pengelolaan Non Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan.

- 1.d Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan daerah lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan pemetaan potensi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir dengan aturan yang berlaku.
- 1.e Kurangnya kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi dapat memberikan gambaran analisis serta dapat menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah.

- 1.f Pengawasan internal belum berbasis risiko
- Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen agar memfokuskan pengambilan kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan.
- 1.g Belum optimalnya penerapan dan evaluasi SOP kepada wajib pajak dengan program penjaminan mutu pelayanan
- Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan dengan baik sehingga perlu dilakukan upaya perumusan, penyusunan, pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan organisasi.
- 1.h Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak.
- Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB masih belum sesuai standar yang berlaku.
- 1.i Peta proses bisnis internal belum dilaksanakan secara optimal
- Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pencapaian standar Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.
- Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis disusun. Peta Proses Bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam

mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, selain itu peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses menjadi lebih terarah.

2. Permasalahan Eksternal

2.a Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2.b Masih rendahnya kontribusi instansi pengelola retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah;

Dari 15 (lima belas) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah pada tahun 2025, hanya 8 (delapan) Perangkat Daerah yang capaian realisasinya melebihi target (>100%) dan 7 Perangkat Daerah lainnya tidak mencapai target (<100%). Upaya intensifikasi koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah telah dilakukan secara optimal hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi yaitu sebesar Rp. 9.313.749.306,- (122,52%) dari target sebesar Rp. 7.601.707.223,-

2.c Iklim ekonomi yang tidak stabil

Adanya pengaruh resesi pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* sehingga menyebabkan iklim ekonomi masyarakat tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru yang berdampak terhadap penerimaan pajak serta terjadinya tunggakan Pajak Daerah sehingga penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak optimal.

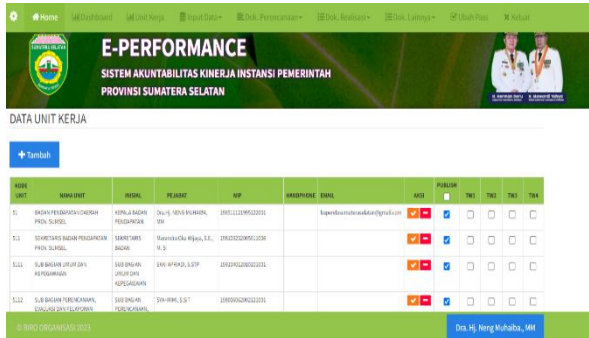
2.d Belum optimalnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

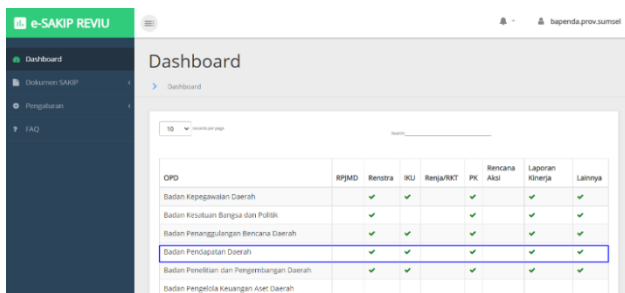
Sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu unsur penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan hibah sehingga tidak dapat ditargetkan. Realisasi penerimaan merupakan hasil pendekatan persuasif kepada BUMN, BUMD ataupun BUMS yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2.e Pengaruh kebijakan nasional dibidang keuangan pusat dan daerah. Amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang dimaksud, adanya opsen sebagai tambahan pungutan pajak menurut persentase tertentu, Bea Balik Nama (BBN) Mutasi pajak yang di gratiskan, namun ada juga tambahan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta beberapa potensi retribusi yang hilang di beberapa OPD terkait.

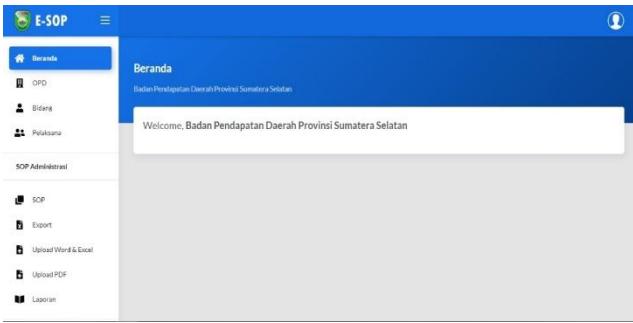
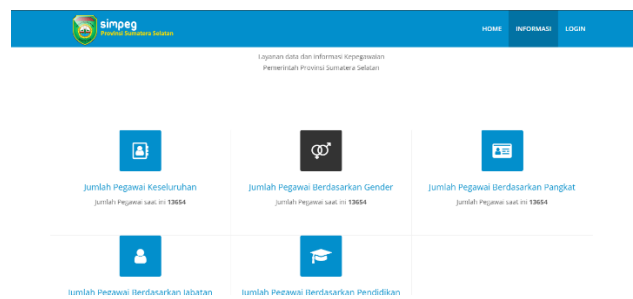
D. Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Dalam Peningkatan Kinerja

Pemantauan atas kinerja yang tertuang di dalam Laporan KITAB telah menggunakan sistem informasi berbasis teknologi dalam peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut :

No.	Sistem Informasi	Kegunaan
1.	e performance  The screenshot shows the 'E-PERFORMANCE' system interface for the 'SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN'. It displays a 'DATA UNIT KERJA' table with columns for Unit, Nama Unit, Rincian, Kode, and various performance indicators. The table lists several units, including 'KEMALAHADIRAN PRODI SLANGEL', 'SEKRETARIAT BAGAN PRODI SLANGEL', 'SUKSES BAKAR JUPITER DAY', and 'SUKSES BAKAR YOKOYOKOYOKO'. Each row has a status indicator (green or red) and a date.	1. Pemantauan kinerja secara berkala waktu (triwulan/bulanan) 2. Sebagai early warning atas kinerja yang tidak tercapai 3. Menjadi rekomendasi perbaikan atas kinerja

		yang tidak tercapai dengan melakukan upaya perbaikan
2.	e SAKIP Reviu 	1. Dokumen kendali atas akuntabilitas kinerja instansi 2. Update dokumen rencana aksi perbaikan 3. Update dokumen tindak lanjut atas rekomendasi APIP / Kemenpan RB
3.	Web site Bapenda 	1. Sebagai sarana publikasi dokumen akuntabilitas kinerja instansi 2. Sebagai sarana komunikasi dual arah antara Bapenda dengan masyarakat 3. Transparansi dalam penggunaan sumber daya untuk pelayanan publik
4.	e Dempo 	1. Peningkatan kinerja pendapatan daerah berbasis android 2. Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak

5.	e signal		1. Peningkatan pendapatan berbasis android 2. Kemudahan memberikan pelayanan kepada wajib pajak	kinerja daerah aplikasi dalam kepada
6.	SiMDA		1. Pemantauan daya serap anggaran sebagai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan 2. Kendali program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran strategis PD	
7.	e PKB		1. Pemantauan kinerja pendapatan daerah atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor	

8.		1. SOP Pemantauan Kinerja 2. SOP Pengendalian dan Evaluasi Program/ 3. Kegiatan/Sub Kegiatan 4. SOP Manajemen Risiko SOP RATL Reformasi Birokrasi
9.		1. SKP terintegrasi dengan individu kinerja

E. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Berikutnya

Atas pemantauan dan evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) Periode Triwulan III (Juli – Agustus – September) tahun 2025, beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:

- Periode Triwulan III tahun 2025 mengalami perlambatan dalam mencapai pencapaian kinerja apabila dibandingkan pada Triwulan III tahun 2024, hal ini perlu dilakukan akselerasi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan agar dapat meningkatkan kinerja sasaran strategis yang ingin di capai pada akhir periode tahun 2025;
- Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;

- c. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
- d. Melakukan uji petik reviu atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
- f. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan instruksi sebagai berikut:
 - 1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar;
 - 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 %;
 - 3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - 6. Lebih selektif dalam pemberian hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa Kepada Kementerian/Lembaga;
 - 7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
- g. Menginstruksikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan penyesuaian terhadap Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference, menyesuaikan terhadap Harga Perkiraan Sendiri, melakukan survei harga satuan serta perubahan dalam Rencana Umum Pengadaan dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- h. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan rencana pendapatan pajak sesuai dengan equivalen dari nilai opsen pajak sama seperti pajak PKB dan BBN-KB tahun sebelumnya;

- i. Kerja kolaboratif antar unit bidang terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD;
- j. Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) dilaksanakan sebagai upaya untuk peningkatan kinerja Pendapatan Daerah;
- k. Manfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengukur kinerja yang telah dibangun antara lain, e – performance, e SAKIP reuiu, web site bapenda, e – dempo, e – signal, SOS, e PAP, e PBB dan sebagainya;
- l. Lakukan pengendalian intern dimulai pada level paling bawah di tingkat operasional staf sampai ke jenjang leveling pimpinan agar permasalahan dan solusi yang tepat dapat diketahui sedini mungkin (*early warning*);
- m. Menerapkan manajemen risiko dalam melakukan pencapaian atas kinerja, agar resiko sebagai akibat kegagalan dalam proses tidak terjadi dan lakukan pemantauan dan dikendalikan secara kontinue;
- n. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.
- o. Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode berikutnya;
- p. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART yaitu:
 - 1. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - 2. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;

3. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
5. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan.



BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud atas pelaksanaan dan pemantauan kinerja secara berkala waktu (triwulanan/bulanan) Triwulan III (Juli – Agustus – September) tahun 2025. Laporan KITAB menyajikan data dan fakta pelaksanaan kinerja yang dilakukan melalui program kegiatan sub kegiatan strategis untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut harus didukung ketersediaan dana dan sumber daya serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Hasil evaluasi dan tindaklanjut dari Laporan KITAB ini menunjukkan adanya komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah : Misi ke 2 (dua) “Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat”, walaupun beberapa indikator belum mencapai target yang ditetapkan karena melemahnya perekonomian yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kurang baik sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, hal tersebut menjadi salah satu sebab tidak tercapainya target penerimaan. Hal ini menjadi pertimbangan dan acuan dalam pencapaian kinerja pada masa selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) Triwulan III Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja selama kurun waktu Triwulan III tahun 2025 serta bahan acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 yang akan datang.

Palembang, 01 Oktober 2025



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. AHMAD RIZWAN, S.STP., M.M

PEMBINA UTAMA MADYA IV/d

NIP. 198109232000121001